

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Persepsi

Definisi persepsi menurut Saleh (2020) merupakan proses pemberian makna terhadap rangsangan yang diterima. Dalam proses ini, selalu ada objek yang menjadi fokus persepsi. Salah satu objek tersebut adalah diri sendiri (*self*), yang bukan merupakan objek tunggal, melainkan terdiri dari berbagai aspek yang kompleks. Secara umum, aspek-aspek dari persepsi terhadap diri dapat dibagi ke dalam empat kategori utama, yaitu aspek fisik, psikologis, sosial-kultural, dan spiritual (Saleh, 2020).

Sementara itu, penjelasan lain mengenai persepsi menekankan bahwa proses ini diawali oleh penginderaan, yaitu saat stimulus ditangkap melalui panca indra (*sensoris*), lalu dilanjutkan ke tahap persepsi sebagai bentuk pengolahan makna lebih lanjut. Dengan kata lain, sebelum seseorang mampu membentuk persepsi termasuk persepsi terhadap diri sendiri diperlukan proses penginderaan terlebih dahulu. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa persepsi merupakan hasil dari interaksi antara stimulus luar dan proses internal individu, termasuk dalam memahami dirinya sendiri (Saleh, 2018).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses yang kompleks dan tidak terjadi secara instan. Proses ini dimulai dari penginderaan terhadap stimulus yang kemudian diolah menjadi

makna oleh individu. Dalam konteks persepsi diri, individu tidak hanya menangkap informasi dari luar, tetapi juga membentuk pemahaman tentang dirinya sendiri melalui berbagai aspek, baik fisik, psikologis, sosial-kultural, maupun spiritual. Oleh karena itu, persepsi diri dipengaruhi oleh pengalaman sensoris sekaligus konstruksi mental yang terbentuk dari interaksi individu dengan lingkungannya.

Beberapa ahli sosiologi dalam Tejokusumo (2014) memberikan definisi yang berbeda mengenai masyarakat. Menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dan dari kebersamaan tersebut muncul suatu kebudayaan. Sementara itu, Max Weber memandang masyarakat sebagai suatu struktur atau tindakan sosial yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai serta harapan-harapan yang berlaku dominan di kalangan anggotanya. Kedua pandangan ini menekankan bahwa kehidupan bersama dan nilai sosial merupakan inti dari terbentuknya masyarakat (Tejokusumo, 2014).

Proses terbentuknya persepsi diawali dengan diterimanya rangsangan melalui pancaindra. Setelah itu, individu memberikan respon awal berupa penilaian dan makna terhadap rangsangan yang diterima. Rangsangan tersebut kemudian diseleksi untuk menentukan mana yang perlu diproses lebih lanjut. Selanjutnya, informasi yang terpilih di organisasi agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah interpretasi, di mana individu menafsirkan rangsangan hingga akhirnya terbentuk persepsi (Pahlevi dkk., 2021)

Menurut Saleh (2018) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses terbentuknya persepsi pada seseorang, antara lain:

1. Objek yang Dipersepsi

Objek merupakan sumber rangsangan (stimulus) yang diterima oleh alat indera. Stimulus ini bisa berasal dari lingkungan luar maupun dari dalam diri individu sendiri, yang langsung mengenai sistem saraf penerima (reseptor). Meskipun demikian, sebagian besar rangsangan yang membentuk persepsi biasanya berasal dari luar diri individu.

2. Alat Indera, Sistem Saraf, dan Otak

Alat indera (reseptor) berfungsi untuk menangkap stimulus yang kemudian diteruskan melalui saraf sensorik ke sistem saraf pusat, yakni otak, yang menjadi pusat kesadaran. Selain itu, untuk merespons stimulus yang diterima, diperlukan juga saraf motorik sebagai penggerak.

3. Perhatian (Atensi)

Perhatian menjadi komponen penting dalam proses persepsi, karena merupakan tahap awal atau bentuk kesiapan individu untuk mulai melakukan proses persepsi. Perhatian dapat diartikan sebagai konsentrasi atau fokus individu terhadap objek tertentu atau rangkaian objek.

Dalam memahami sikap dan persepsi seseorang terhadap suatu objek, menurut Mar'at dalam M. Thaeb (2017) terdapat tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Komponen Kognitif

Merupakan aspek yang didasarkan pada informasi, pengetahuan, kepercayaan, ide, dan konsep yang dimiliki individu mengenai suatu objek. Melalui pengetahuan ini, terbentuklah keyakinan tertentu terhadap objek yang diamati atau dinilai.

2. Komponen Afektif

Berhubungan dengan reaksi emosional atau perasaan seseorang terhadap objek, baik rasa suka maupun tidak suka. Komponen ini bersifat evaluatif dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma, serta sistem keyakinan yang dianut oleh individu.

3. Komponen Konatif

Menunjukkan kecenderungan atau dorongan individu untuk bertindak atau merespons suatu objek. Komponen ini mencerminkan kesiapan dan intensi seseorang dalam berperilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap objek yang menjadi pusat perhatian (M. Thaeb, 2017).

Menurut Irwanto sebagaimana dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk. (2020), setelah individu melakukan interaksi dengan objek-objek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:

1. Persepsi positif, yaitu persepsi yang menggambarkan pengetahuan dan tanggapan yang diikuti dengan upaya pemanfaatan serta sikap menerima dan mendukung objek yang dipersepsikan.
2. Persepsi negatif, yaitu persepsi yang menggambarkan pengetahuan dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsikan, yang diteruskan dengan kepasifan atau penolakan terhadap objek tersebut.

Baik persepsi positif maupun negatif, keduanya akan selalu mempengaruhi bagaimana individu mengambil keputusan atau bertindak terhadap suatu fenomena (Pratiwi dkk., 2019). Dalam penelitian ini, fenomena yang dipersepsikan adalah *money politics* dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Persepsi positif dapat dimaknai sebagai sikap menerima atau membenarkan praktik *money politics*, sedangkan persepsi negatif ditunjukkan melalui sikap menolak, tidak setuju, dan menganggap praktik tersebut merusak demokrasi. Sementara itu, dimensi kognitif, afektif, dan konatif digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan, sikap, serta kecenderungan tindakan masyarakat terhadap praktik *money politics*.

2.1.2 *Money politics*

Istilah *money politics* atau politik uang menurut Danius (1999) dalam Huda (2022) mengacu pada penggunaan uang atau bentuk materi lainnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan tertentu. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk mengarahkan, membujuk, atau mengintervensi seseorang agar membuat keputusan yang sesuai dengan kepentingan pihak pemberi. Politik uang menempatkan materi sebagai instrumen utama dalam membangun pengaruh terhadap tindakan individu, terutama dalam konteks politik dan pemilihan umum (Huda dkk., 2022).

Sedangkan, pengertian politik uang menurut Aspinall dan Sukmajati merupakan fenomena yang erat kaitannya dengan praktik patronase dan klientelisme. Dalam sistem patron-klien ini, kandidat atau elite politik berperan sebagai patron yang memberikan sumber daya kepada klien (pemilih) sebagai imbalan atas dukungan politik, seperti suara dalam pemilihan (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Menurut Huda, praktik politik uang tidak terbatas pada hari pemungutan suara saja, melainkan dapat terjadi sejak tahap pencalonan kandidat, selama masa kampanye, hingga proses penghitungan suara. Terdapat dua bentuk utama dalam pelaksanaannya: secara langsung dengan memberikan uang tunai kepada pemilih, dan secara tidak langsung melalui pembagian barang yang memiliki nilai tukar maupun nilai guna yang tinggi. Meski Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak menyebut secara eksplisit istilah "politik uang," regulasi

tersebut menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” sebagai bentuk larangan terhadap praktik jual beli suara dalam penyelenggaraan pemilu (Huda dkk., 2022)

Dalam bukunya Aspinall dan Sukmajati menjelaskan bahwa Politik uang tidak hanya mencakup pemberian uang tunai, tetapi juga bisa berupa pemberian barang, jasa, janji kerja, atau bentuk bantuan sosial lainnya. Fenomena ini berkembang karena lemahnya institusi demokrasi, tingginya angka kemiskinan, dan rendahnya tingkat literasi politik masyarakat. Dalam konteks ini, pemilih cenderung memandang pemilu sebagai momen untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sesaat, alih-alih sebagai proses demokratis untuk memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015) dalam Stange (2017), praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Pembelian Suara

Merupakan bentuk politik uang yang paling sering terjadi, di mana pemilih menerima uang atau barang sebagai imbalan untuk memilih kandidat tertentu.

2. Pemberian Donasi

Donasi diberikan kepada individu atau kelompok sebagai bentuk timbal balik atas dukungan politik. Bantuan ini bisa berupa uang, barang, maupun jasa.

3. Pemanfaatan Fasilitas Negara

Mengacu pada penggunaan aset atau sumber daya milik negara, seperti proyek pembangunan, yang dialihkan demi kepentingan kampanye pribadi

4. Uang Mahar Politik

Merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh calon kandidat untuk mendapatkan dukungan atau tiket pencalonan dari partai politik.

5. Distribusi Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial atau program kesejahteraan yang sengaja dilaksanakan menjelang pemilu dengan tujuan untuk memperoleh simpati dan suara pemilih.

6. Suap kepada Penyelenggara Pemilu

Melibatkan tindakan menyuap pihak penyelenggara pemilu, baik berupa uang maupun barang, agar mereka memengaruhi jalannya atau hasil pemilihan sesuai kepentingan pihak tertentu.

2.1.3 Hubungan Persepsi Masyarakat dengan Money Politics

Persepsi masyarakat merupakan hasil dari proses kognitif ketika individu mengorganisasi, menginterpretasi, dan memberikan makna terhadap stimulus atau realitas sosial yang mereka hadapi (Rakhmat, 2018). Persepsi tidak hanya terbentuk dari aspek pemahaman, emosi, dan tindakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, sosial-kultural, dan spiritual individu. Keempat aspek ini membentuk cara seseorang mengevaluasi praktik *money politics*, apakah praktik tersebut dianggap sebagai penyimpangan demokrasi atau justru sebagai sesuatu yang dapat diterima.

Secara fisik, kondisi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap politik uang. Menurut Maslow (dalam Feist & Feist, 2017), kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling mendasar yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu. Ketika masyarakat berada pada kondisi ekonomi yang rentan, mereka cenderung memaknai pemberian uang atau barang dari kandidat sebagai bentuk bantuan langsung yang memenuhi kebutuhan mendesak. Hal ini membuat masyarakat mengembangkan persepsi positif atau netral terhadap praktik *money politics* karena dianggap memberikan manfaat material langsung (Aspinall & Sukmajati, 2016). Dengan demikian, masyarakat dengan kondisi fisik dan ekonomi rentan lebih mudah menerima praktik politik uang dibandingkan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih stabil.

Pada aspek psikologis, persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, motivasi, dan preferensi politik individu. Menurut Walgito (2017), pengalaman masa lalu dan harapan individu akan membentuk persepsi terhadap suatu objek. Individu yang pernah mendapatkan keuntungan atau merasa diuntungkan oleh kandidat melalui bantuan materi cenderung memaknai politik uang sebagai praktik yang wajar atau tidak merugikan. Sebaliknya, individu yang memiliki tingkat kesadaran politik tinggi serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara biasanya menilai politik uang sebagai bentuk manipulasi suara dan penyimpangan moral (Surbakti, 2018). Faktor psikologis seperti kebutuhan akan kepastian, kepercayaan terhadap kandidat, serta tingkat literasi politik juga ikut menentukan apakah seseorang memiliki persepsi negatif atau positif terhadap praktik *money politics*.

Dari aspek sosial-kultural, persepsi masyarakat dibentuk oleh norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan dalam lingkungan sosial. Menurut Koentjaraningrat (2009), budaya memiliki peran besar dalam membentuk cara masyarakat memaknai fenomena sosial. Dalam banyak daerah di Indonesia, pemberian uang atau barang menjelang pemilu sering dianggap sebagai tradisi turun-temurun atau bentuk “rasa terima kasih” dari kandidat, bukan sebagai bentuk pelanggaran hukum (Aspinall & Sukmajati, 2015). Tekanan kelompok, opini tokoh masyarakat, serta norma sosial tentang kepatutan memberi dan menerima dapat mendorong individu mengembangkan persepsi permisif terhadap *money politics*. Ketika lingkungan sosial memaklumi atau bahkan mengharapkan pemberian materi dari

kandidat, masyarakat cenderung menilai politik uang sebagai sesuatu yang sah dan dapat diterima.

Pada aspek spiritual, keyakinan agama dan nilai moral memegang peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap praktik *money politics*. Menurut Jalaluddin (2016), nilai spiritual mempengaruhi cara seseorang menilai suatu tindakan sebagai benar atau salah berdasarkan ajaran agama dan prinsip moral yang dianut. Individu dengan tingkat religiusitas tinggi biasanya memiliki persepsi negatif terhadap politik uang karena dipandang sebagai tindakan tidak jujur, manipulatif, dan bertentangan dengan nilai etika (Mujani, 2007). Sebaliknya, masyarakat dengan pemahaman moral yang rendah lebih cenderung memaknai *money politics* secara pragmatis tanpa mempertimbangkan aspek etis dan moral.

Silang pengaruh dari aspek fisik, psikologis, sosial-kultural, dan spiritual tersebut pada akhirnya membentuk cara masyarakat merespons praktik politik uang. Persepsi yang negatif—baik karena kesadaran moral, pemahaman politik, maupun nilai sosial—akan menurunkan kecenderungan individu untuk menerima atau terlibat dalam *money politics*. Sebaliknya, persepsi yang lebih permisif, didorong oleh kebutuhan materi mendesak atau tekanan budaya, akan meningkatkan kecenderungan masyarakat menerima politik uang dalam proses pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat memiliki peran signifikan dalam menentukan apakah *money politics* dapat diterima atau ditolak,

terutama dalam konteks Pilkada Kota Tasikmalaya yang memiliki dinamika sosial dan budaya khas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi penting bagi penulis dalam menjalankan proses penelitian. Melalui penelitian-penelitian sebelumnya, penulis dapat memperluas dan memperdalam pemahaman teoritis yang digunakan dalam studi ini. Berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mendukung dan memperkuat landasan penelitian yang sedang dikerjakan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Persepsi Pemilih tentang Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Jawa Tengah pada Masa Pandemi	Neny Marlina, Priyatno Harsasto, dan Supratiwi	Pendekatan Kuantitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Jawa Tengah memaknai dan menanggapi praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Pada penelitian ini mengungkap bahwa krisis ekonomi akibat pandemi menjadi celah bagi suburnya praktik	Penelitian tersebut berfokus pada persepsi pemilih terhadap praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam konteks pandemi Covid-19. Penelitian ini menggambarkan bagaimana kondisi krisis ekonomi akibat pandemi membuka ruang suburnya praktik politik uang.

				politik uang. Sebanyak 66% suara dari masyarakat yang menilai seperti itu dan mereka menilai pemberian uang atau bantuan sosial sebagai hal yang wajar. Penelitian ini juga menyoroti bahwa politik uang terjadi dalam berbagai bentuk dan tahap, serta dimaknai secara beragam oleh pemilih, tergantung latar belakang dan kondisi ekonomi mereka selama pandemi.	Penelitian ini juga menyoroti berbagai bentuk politik uang, seperti pembagian uang tunai dan sembako, serta menelusuri beragam persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut, apakah dianggap wajar atau sebagai pelanggaran demokrasi. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh persepsi masyarakat terhadap fenomena serangan fajar, yang merupakan salah satu bentuk spesifik dari politik uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dan tidak berada dalam konteks pandemi. Dengan demikian, perbedaan terletak pada fokus fenomena, lokasi dan cakupan wilayah, serta konteks sosial yang memengaruhi dinamika persepsi masyarakat dalam menghadapi politik uang.
--	--	--	--	---	---

2.	Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018)	Hardianto Hawing dan Nursaleh Hartaman	Metodologi penelitian menggunakan metode kuantitatif, bentuk survey	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih dalam Pilkada Kabupaten Enrekang tahun 2018. Penelitian menggunakan teori partisipasi politik, teori perilaku memilih (sosiologis, psikologis, dan rational choice), dan teori kontestasi politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang berpengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih, dengan kontribusi sebesar 26,1% (koefisien determinasi). Bentuk politik uang yang ditemui meliputi pemberian uang tunai (personal dan kelompok), sembako, janji politik, hingga bantuan sosial dan proyek. Fenomena "serangan fajar" juga ditemukan sangat dominan di H-1 pemungutan suara. Meskipun begitu, tidak semua pemilih terpengaruh politik uang sebagian memilih berdasarkan kedekatan kandidat, kesamaan daerah,	Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus variabel, ruang lingkup, dan konteks analisis. Penelitian oleh Hardianto Hawing dan Nursaleh Hartaman mengevaluasi pengaruh politik uang secara umum terhadap perilaku memilih dalam Pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018, dengan pendekatan yang menekankan pada hubungan antara berbagai bentuk politik uang (uang tunai, sembako, janji politik) terhadap keputusan memilih. Sementara itu, penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji pengaruh persepsi masyarakat terhadap fenomena serangan fajar, yaitu salah satu bentuk nyata politik uang yang terjadi menjelang hari pemilihan, dalam konteks Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024.

				dan visi-misi.	
3.	Hubungan Persepsi Masyarakat Mengenai Money Politic dengan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2017 (Studi Korelasi di RT 16 RW 06, Kelurahan Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur)	Lita Arofu	Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi masyarakat terhadap politik uang (money politic) dengan partisipasi politik mereka dalam pemilihan gubernur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional, dengan data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 143 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi masyarakat mengenai money politic dengan tingkat partisipasi politik mereka.	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Lita Arofu terletak pada variabel yang digunakan dan fokus analisis. Penelitian Lita Arofu meneliti hubungan antara persepsi terhadap politik uang dan partisipasi politik, sedangkan penelitian ini tidak mengkaji partisipasi politik sebagai variabel terikat. Fokus penelitian ini adalah mengukur pengaruh persepsi masyarakat terhadap fenomena serangan fajar, sebagai bentuk spesifik dari politik uang, dalam konteks Pilkada Kota Tasikmalaya 2024.
4.	Persepsi Masyarakat terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	Fitra Hermansyah	Pendekatan kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyadari praktik politik dinasti dan memahami faktor-faktor yang mendukung keberlangsungannya, seperti jaringan kekuasaan keluarga, hubungan sosial, politik balas budi, serta keterlibatan tokoh masyarakat.	Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Hermansyah mengkaji fenomena politik dinasti di tingkat desa sebagai bentuk regenerasi kekuasaan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan antara kepala desa dan penerusnya. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada

				Meskipun menyadari dampak negatif politik dinasti, 80,1% responden tetap menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan sah, karena kuatnya kedekatan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap keluarga kepala desa.	praktik politik uang, khususnya fenomena serangan fajar yang terjadi menjelang hari pemungutan suara dalam Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024. Dari segi pendekatan, penelitian Fitra menggunakan metode kuantitatif deskriptif tanpa menganalisis hubungan antar variabel, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional untuk menguji pengaruh persepsi masyarakat yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif terhadap sikap mereka dalam merespons serangan fajar.
--	--	--	--	---	--

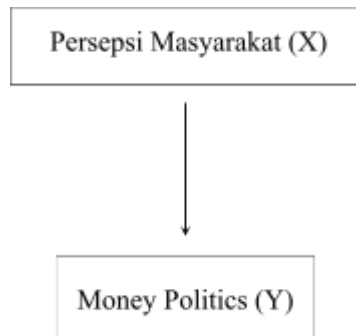
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap praktik *money politics* dalam Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024, khususnya di Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas pengaruh antara variabel bebas dan terikat, melainkan hanya menyajikan pemetaan data persepsi

masyarakat melalui pengukuran statistik deskriptif, seperti rata-rata, frekuensi, dan persentase.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara persepsi masyarakat sebagai variabel independen (X) dengan money politics sebagai variabel dependen (Y). Persepsi masyarakat terbentuk melalui proses penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman, informasi, kondisi lingkungan, dan nilai-nilai yang dianut individu. Menurut Rakhmat (2018), persepsi seseorang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal, sehingga menghasilkan penafsiran tertentu terhadap fenomena sosial. Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat mencakup aspek fisik, psikologis, sosial-kultural, dan spiritual yang turut menentukan bagaimana masyarakat menilai praktik politik uang.

Pada aspek fisik, kondisi ekonomi seseorang dapat membentuk cara berpikir dan menilai praktik money politics. Individu dengan kondisi ekonomi yang rentan cenderung memandang pemberian uang atau barang dari kandidat

sebagai bentuk bantuan yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak. Hal ini menyebabkan mereka lebih mudah menerima praktik politik uang. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil mungkin memiliki persepsi yang lebih kritis dan cenderung menolak praktik tersebut.

Aspek psikologis, seperti motivasi, pengalaman politik, tingkat literasi politik, dan evaluasi moral, turut membentuk persepsi seseorang terhadap money politics. Individu yang memiliki pemahaman politik yang baik dan kesadaran moral yang tinggi akan menilai politik uang sebagai tindakan yang melanggar prinsip demokrasi. Sementara itu, individu dengan pengalaman positif atau keuntungan yang pernah diperoleh dari pemberian materi dapat membentuk persepsi permisif terhadap praktik tersebut.

Aspek sosial-kultural juga memainkan peran penting. Norma, tradisi, pengaruh kelompok, dan budaya lokal dapat menciptakan persepsi yang berbeda terhadap praktik politik uang. Di beberapa lingkungan, politik uang dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sebagai bagian dari tradisi politik. Kondisi ini menyebabkan individu menilai praktik tersebut bukan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai kebiasaan yang diterima masyarakat.

Sedangkan aspek spiritual berhubungan dengan nilai moral, etika, dan ajaran agama yang menjadi dasar penilaian individu terhadap tindakan tertentu. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memandang politik uang sebagai tindakan yang tidak etis, manipulatif, dan bertentangan dengan

ajaran moral. Hal ini mendorong mereka untuk menolak segala bentuk pemberian yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik.

Keempat aspek persepsi tersebut pada akhirnya mempengaruhi tindakan masyarakat dalam merespons praktik money politics. Jika persepsi masyarakat terhadap politik uang negatif—misalnya menganggapnya sebagai tindakan tidak etis, merusak demokrasi, atau bertentangan dengan nilai moral—maka kecenderungan menerima atau terlibat dalam praktik tersebut akan rendah. Sebaliknya, apabila persepsi masyarakat permisif atau positif—baik karena kebutuhan ekonomi, tekanan sosial, ataupun budaya lokal—maka politik uang cenderung lebih mudah diterima.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh terhadap praktik money politics. Dengan demikian, hubungan antara variabel X (Persepsi Masyarakat) dan variabel Y (Money Politics) dapat digambarkan sebagai hubungan sebab-akibat di mana persepsi menjadi faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menerima atau menolak politik uang. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional untuk menguji seberapa besar pengaruh persepsi masyarakat terhadap praktik money politics dalam konteks Pilkada Kota Tasikmalaya.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian teori mengenai persepsi masyarakat dan praktik politik uang, dapat dipahami bahwa persepsi merupakan proses internal yang mencakup penilaian psikologis, sosial-kultural, dan moral terhadap suatu fenomena (Saleh,

2020). Persepsi yang terbentuk dalam diri individu akan mempengaruhi bagaimana seseorang merespons stimulus politik, termasuk praktik *money politics* yang terjadi selama proses pemilu. Semakin negatif persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang—baik dari aspek moral, nilai budaya, maupun dampak yang ditimbulkannya—semakin kecil kecenderungan individu untuk menerima atau mendukung praktik tersebut. Sebaliknya, apabila persepsi masyarakat terhadap politik uang bersifat permisif atau netral, maka peluang untuk terjadinya penerimaan terhadap praktik *money politics* akan semakin tinggi.

Di sisi lain, politik uang sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk sebagaimana diklasifikasikan oleh Aspinall dan Sukmajati (2015) dalam Stange (2017), mulai dari pembelian suara (*vote buying*), pemberian donasi dan bantuan sosial, penyalahgunaan fasilitas negara, uang mahar politik, hingga suap kepada penyelenggara pemilu. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa fenomena politik uang masih menjadi strategi dominan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat penerimaan, resistensi, maupun partisipasi masyarakat terhadap politik uang pada konteks pemilu atau pilkada.

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran tersebut, hubungan antara persepsi masyarakat (variabel X) dan *money politics* (variabel Y) tampak bersifat logis dan terukur. Persepsi yang positif atau permisif dapat meningkatkan kecenderungan menerima politik uang, sedangkan persepsi negatif atau menolak akan menurunkan kemungkinan terjadinya penerimaan terhadap politik uang.

Dengan demikian, secara konseptual dapat diharapkan adanya pengaruh antara persepsi masyarakat terhadap praktik *money politics* pada Pilkada Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh persepsi masyarakat terhadap praktik *money politics* pada Pilkada Kota Tasikmalaya.
- H0: Tidak terdapat pengaruh persepsi masyarakat terhadap praktik *money politics* pada Pilkada Kota Tasikmalaya.